

Rabu, 21 September 2011

Sekwan: Zulfadhli Harus Kembalikan Mobil

Pontianak, BERKAT.

Sekretaris DPRD Kalbar, Drs. Bambang Soerachmat, mengatakan sudah berkali-kali menyurati mantan Ketua DPRD Kalbar, Ir. H. Zulfadhli, agar kendaraan dinas operasional Ketua DPRD Kalimantan Barat periode 2004-2009, merk Toyota Camry 2400 AT untuk segera dikembalikan kepada pemerintah provinsi Kalbar. Bahkan jelas Bambang, masalah ini menjadi salah satu catatan dalam hasil pemeriksaan Tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) terhadap Laporan Keuangan Pemprov 2010.

Sekretaris DPRD Kalbar juga sudah menyurati Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kalbar pada 8 September 2011 dan menyampaikan konfirmasi atas temuan BPK dimaksud. Berdasarkan arsip di Sekretariat DPRD, Zulfadhli saat menjabat sebagai Ketua DPRD pernah menyurati

pemprov pada 3 September 2009 silam. Dalam surat itu, Zulfadhli menyampaikan permohonan hibah/pinjam pakai kendaraan ini karena merasa masih memerlukan kendaraan tersebut pasca-memangku jabatan Pimpinan DPRD Kalbar.

Namun, permintaan ini ditolak pemprov melalui surat Plt Sekretaris Daerah Kalbar, MH Munsin tertanggal 3 April 2010. Dalam surat itu, pemprov menyatakan bahwa dengan berakhirnya masa bakti pimpinan dan anggota DPRD Periode 2004-2009, kendaraan dinas jabatan pimpinan DPRD maupun kendaraan operasional yang dipinjamkan kepada Anggota DPRD harus dikembalikan kepada pemda cq Sekretaris DPRD selaku pengguna anggaran/barang paling lambat satu bulan sejak tanggal pemberhentian.

Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Mendagri Nomor 024/3341/SJ. Kemudian sebelumnya, Sekretaris DPRD sudah

menyurati Zulfadhli pada 1 Oktober 2009 (Nomor 028/369/Set.DPRD-A). Dalam surat ini, Sekretaris DPRD meminta agar yang bersangkutan mengembalikan kendaraan dinas operasional pimpinan DPRD tersebut. Surat pemberitahuan ke-2 dilayangkan pada 29 Oktober 2009 dengan nomor surat 028/490/Set.DPRD-A. Surat terakhir dilayangkan pada 28 April 2010 tentang penarikan kendaraan dinas jabatan pimpinan DPRD periode 2004-2009.

Surat ini menerangkan bahwa kendaraan dinas jabatan Ketua DPRD itu sudah tidak memiliki nomor polisi. Sebab, nomor polisi KB 4, sekarang terdaftar dan dipergunakan atas nama kendaraan Ketua DPRD Kalbar periode 2009-2014.

Sementara itu Mantan Ketua DPRD Kalbar, Zulfadhli menyebutkan, persoalan mobil dinas ini sudah berlangsung lama. Zulfadhli juga mengakui bahwa pemprov melalui sekretaris daerah pernah me-

nyurati dirinya dan meminta mobil tersebut dikembalikan.

"Tetapi saya sebelumnya sudah menyurati pemprov memohon peminjaman mobil itu. Suratnya resmi lho," ujarnya.

Menurut Zulfadhli, mobil tersebut masih diperlukannya untuk mendukung tugas-tugas karena dirinya masih menjabat sebagai anggota DPR-RI yang mewakili Kalbar. Mobil itu digunakan saat kunjungan lapangan ke daerah-daerah di Kalbar ketika masa reses. "Apa itu salah? Saya mewakili masyarakat Kalbar juga. Kecuali kalau saya tidak lagi bertugas untuk kepentingan Kalbar," katanya.

Ia meminta pemprov dapat mempertimbangkan kembali permohonan pinjam pakai yang pernah disampaikan sebelumnya. Dalam hal ini, pemprov juga diharapkan bersikap bijaksana dan dapat memberi kesempatan kepadanya untuk memakai mobil itu. (aca)